

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan adalah uraian sistematis hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, dan ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian perihal pendidikan inklusi telah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya:

Pertama, penelitian oleh Nissa Tarnoto (2014) yang berjudul “Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD” penelitian ini menggunakan pendekatan yang diarahkan untuk mengupayakan *indigenious*. *Indigenious* merupakan kajian ilmiah tentang perilaku atau akal manusia yang tidak ditransportasikan dari wilayah lain, dan direncanakan untuk masyarakatnya. Penelitian ini berfokus pada masalah-masalah apa saja yang terdapat pada sekolah inklusi yang selama ini sudah mulai berjalan sejak ditetapkan oleh pemerintah, meskipun belum merata tersebar di seluruh Indonesia. Adapun kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa permasalahan pada sekolah inklusi terletak dari berbagai macam faktor, diantaranya dari guru sebagai tenaga pendidik di sekolah, murid, orang tua, juga pemerintah sebagai pemegang kendali sistem di pusat yang mengatur regulasi terkait sekolah inklusi atau pendidikan untuk penyandang disabilitas. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu Sekolah Dasar (SD) dijadikan sebagai objek penelitian.

Kedua. Penelitian oleh Ery Wati (2014) yang berjudul “Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh” mengemukakan perihal pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh sembilan Sekolah Dasar (SD) yang telah ditunjuk oleh pemerintah Aceh sebagai sekolah inklusi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini diantaranya adalah kepala sekolah di sekolah tempat penelitian tersebut telah mengupayakan beberapa program kerja yang telah disusun. Adapaun hambatan yang dialami adalah persoalan dana operasional, sarana prasarana yang masih kurang memadai juga tenaga guru yang masih minim. Persamaan kedua penelitian ini adalah perihal pendidikan di sekolah inklusi.

Ketiga, penelitian oleh Astri Hanjarwati dan Siti Aminah (2014) yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi” mengemukakan perihal permasalahan implementasi sekolah inklusi yang ada di Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini mencoba mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat terhadap berjalannya sekolah inklusi di Kota Yogyakarta yang ternyata masih banyak ditemukan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang juga belum mendapatkan pendidikan formal. Sebelum adanya peraturan mengenai pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta, anak-anak penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan sekolah-sekolah reguler pada umumnya. Mereka selalu dialihkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini membuat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) semakin merasa terkucilkan. Maka dari itu pemerintah dirasa perlu mengeluarkan payung hukum yang lebih jelas terkait pendidikan inklusi guna memenuhi hak

anak-anak penyandang disabilitas dalam pendidikan. Melihat dari fokus penelitian di atas maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif naturalistik formatif, yaitu evaluasi terhadap program yang sedang dikembangkan, memiliki sifat inovatif, berkonsentrasi pada evaluasi program, memfasilitasi implementasi supaya lebih efektif, dan mengemukakan hasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah pendidikan pada sekolah inklusi secara menyeluruh di Kota Yogyakarta sudah berlangsung dengan baik. Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Walikota Yogyakarta mendorong sekolah pada jenjang lain seperti sekolah menengah juga memberikan peluang akses untuk anak-anak penyandang disabilitas untuk dapat bersekolah. Persamaan yang didapat dari penelitian ini adalah perihal pendidikan sekolah inklusi pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Adapun yang membedakan adalah perihal sudut pandang aspek yang dievaluasi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eka Sari Setianingsih dan Ikha Listyarini (2019) berjudul “Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Bina Harapan Semarang” juga meneliti terkait pendidikan inklusi, lebih spesifiknya tempat penelitiannya adalah di Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Bina Harapan Semarang belum memenuhi standar yang baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya SK penunjukkan sekolah sebagai sekolah inklusi, sehingga menjadikan pemenuhan kebutuhan dari aspek fasilitas, administrasi dan tenaga pendidiknya belum memadai. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti

pendidikan inklusi di Semarang. Adapun perbedaannya adalah jenis konsentras yang dievaluasi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Munawir Yusuf (2012) berjudul “Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Inklusif” mengemukakan bahwa terdapat sedikit perbedaan pencapaian dalam pengimplementasian pendidikan inklusif di tempat yang diteliti. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena kepala sekolah lebih sering menghadiri forum diskusi perihal pembekalan pendidikan untuk sekolah inklusi sedangkan guru masih kurang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode survei sebagai tolak ukur kinerja antara kepala sekolah dengan guru dalam pengimplementasian pendidikan inklusif. Penelitian ini memiliki kesamaan penelitian tentang pendidikan inklusi. Sedangkan yang membedakan adalah fokus objek penelitiannya.

Keenam, penelitian oleh Ashiong P. Munthe (2015) yang berjudul “Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan” mengemukakan tentang esensi dari evaluasi program terlebih khusus dalam bidang pendidikan. Menurutnya evaluasi tidak sebatas hanya penilaian daripada pencapaian, tetapi juga mencakup pada pencarian informasi, penemuan dan pemetaan informasi yang telah didapat sebagai bahan pertimbangan mana yang efektif untuk terus dilaksanakan dan mana yang dirasa tidak lagi efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu dokumen deskriptif, wawancara dan observasi. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada evaluasi program, yang membedakannya adalah objek yang dijadikan penelitian.

Ketujuh, penelitian dilakukan oleh Haryono, Ahmad Syaifudin dan Sri Widiastuti (2015) yang berjudul “Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Provinsi Jawa Tengah” bersifat evaluatif dan menggunakan metode CIPP. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi pendidikan inklusi di Jawa Tengah dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena tidak adanya batasan jumlah Angka Berkebutuhan Khusus (ABK) yang diterima pada suatu sekolah inklusi, sehingga menyebabkan terjadi ketimpangan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di beberapa sekolah. Selain itu, kurikulum yang dikembangkan dan diterapkan pada sekolah inklusi di Jawa Tengah dinilai masih kurang spesifik untuk pengaturan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengenyam pendidikan di sekolah inklusi. Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitiannya. Sedangkan yang membedakan adalah lokasi yang dijadikan tempat penelitian.

Kedelapan, penelitian oleh Kharisul Wathoni (2013) yang berjudul “Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Pendidikan Islam” mengemukakan bahwa pendidikan inklusi tidak boleh terdapat unsur dikotomi di dalamnya. Baik dari administrasi, kurikulum maupun implementasinya di sekolah. Sejauh ini belum tampak adanya sekolah islam yang dijadikan sebagai salah satu sekolah inklusi. Meskipun memang kita ketahui karena banyak hal yang harus dipersiapkan, akan tetapi gagasan ini dapat dijadikan tawaran yang patut dipertimbangkan untuk implementasi pendidikan inklusi ke depannya.

Kesembilan, penelitian oleh Rika Widyawati (2017) yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar” merupakan penelitian evaluasi yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Klero 02 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa sarana prasarana untuk kebutuhan sekolah secara menyeluruh sudah cukup memenuhi, akan tetapi sarana prasarana untuk Anak Kebutuhan Khusus (ABK) belum tercukupi. Selain itu juga kurikulum sudah dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah tempat penelitian.

Kesepuluh, penelitian oleh Qumruin Nurul Laila (2018) yang berjudul “Problematika Pendidikan Inklusi di Sekolah” menjelaskan bahwa pendidikan inklusi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan diterima di masyarakat. Meskipun dalam implementasinya masih banyak kendala yang dihadapi. Penelitian ini bersifat kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan antara kedua penelitian ini adalah subyek penelitian.

Kesebelas, penelitian oleh Richel C. Dapudong (2014) yang berjudul “*Teachers’ Knowledge and Attitude towards Inclusive Education: Basis for an Enhanced Professional Development Program*” meneliti terkait pengetahuan guru-guru yang akan diteliti di empat sekolah yang ada di Filipina tentang kebijakan pendidikan inklusi. Persamaan kedua penelitian ini adalah Peneliti menggunakan metode survei deskriptif dalam data dasar, yaitu untuk melihat gambaran umum populasi dan sifat dari kondisi yang ada. Deskriptif metode ini pada dasarnya adalah teknik kualitatif maupun deskripsi kuantitatif. Adapun yang

membedakan adalah perihal yang diteliti, penelitian ini memiliki focus pada pengetahuan guru tentang kebijakan pendidikan inklusi, sedangkan peneliti akan berfokus pada manajemen sekolah.

B. Kerangka Teori

1. Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi Program

Secara bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation*. Adapun dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-Taqdir*. Dalam bahasa Indonesia yang berarti penilaian. Akar katanya adalah *value*, dalam bahasa Arab; *al-Qimah* yang berarti nilai.

Secara istilah menurut Wandt dan Brown (1977) sebagaimana dikutip Sudijono (2005:1) pengertian evaluasi secara istilah adalah *'Evaluation refer to the act or process to determining the value of something'*. Berdasarkan pengertian ini evaluasi merujuk kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai atau sesuatu.

Menurut Tayibnapi (2000: 9) program merupakan segala sesuatu yang dicoba dan dilakukan seseorang dengan harapan akan mendapatkan hasil dan pengaruh yang baik bagi program. Program yang dapat mempengaruhi dalam suatu lembaga atau instansi yakni adalah program yang memiliki tujuan dan manfaat bagi lembaga yang mengadakan program tersebut.

Evaluasi program merupakan suatu proses, yang secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan.

Kesimpulan dari pengertian evaluasi program yaitu evaluasi program harus dilaksanakan dengan baik agar mendapatkan hasil, pengaruh dan berdampak positif pada perkembangan program. Sehingga setiap program yang dievaluasi dapat mengetahui dan menjadi tolak ukur pelaksanaan program dalam tingkat keberhasilan suatu program untuk mencapai tujuan program.

b. Tujuan Evaluasi Program

Tujuan evaluasi program dapat diartikan sebagai salah satu jalan alternative dalam menentukan suatu proses dalam program. Darussalam (2010) sebagaimana dikutip Muiyasaroh dan Sutrisno (2014: 2016) menyatakan bahwa evaluasi program dibuat untuk meninjau kembali atas upaya pencapaian tujuan dan untuk membantu dalam memberikan alternative berikutnya dalam pengambilan keputusan.

Pencapaian tujuan evaluasi sebagai langkah untuk mengetahui keterlaksanaan suatu program. Sehingga dari hasil evaluasi program

tersebut evaluator dapat mengetahui bagian-bagian yang belum terlaksana dan mengetahui apa penyebab dari belum terlaksananya program sesuai dengan tujuan dari program tersebut.

c. Fungsi Evaluasi Program

Fungsi pada evaluasi menurut Scriven (1967) sebagaimana dikutip Arifin (2013:16) menjelaskan fungsi evaluasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi normatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang telah diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu. Sedangkan pada fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari system secara keseluruhan dengan fungsi ini baru dapat dilaksanakan apabila pengembangan telah dianggap selesai.

d. Model-Model Evaluasi Program

Model evaluasi banyak dikategorikan berdasarkan menurut para ahli yang menemukan maupun mengembangkannya. Adapula yang diberi nama sesuai dengan sifatnya. Dalam hal ini Stephen Isaac (1989) sebagaimana dikutip Arikunto dan Jabar (2014:40) mengatakan bahwa model-model evaluasi diberi nama sesuai dengan focus atau penekanannya. Isaac membedakannya menjadi empat kategori yaitu berorientasi pada program tujuan, berorientasi pada keputusan, berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya, dan berorientasi pada pengaruh dan dampaknya.

Stufflebeam, Metfessel, Michel Scriven, Stake, dan Glaser.

Kaufman dan juga Thomas membedakan evaluasi menjadi delapan:

- 1) Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler
- 2) Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Michel Scriven
- 3) Formatif Sumatif evaluation Model, dikembangkan oleh Michel Scriven
- 4) Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake
- 5) Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake
- 6) CSE-UCLA Evaluation Model, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan
- 7) CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam
- 8) Discrepancy Evaluation Model, dikembangkan oleh Provous

e. Model Evaluasi CIPP

Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam dkk (1967). Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Tujuannya adalah untuk membantu administrator (kepala sekolah dan guru) didalam membuat keputusan. Menurut Stufflebeam dalam (Eko Putro, 2009:35) mengungkapkan bahwa, “*the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve.*” Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam

dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki.

CIPP merupakan singkatan dari:

- 1) *Context evaluation* : evaluasi terhadap konteks
- 2) *Input evaluation* : evaluasi yang berkaitan dengan masukan
- 3) *Process evaluation* : evaluasi yang berkaitan dengan proses
- 4) *Product evaluation* : evaluasi yang berkaitan dengan hasil

Berikut merupakan penjelasan dari CIPP:

1) Evaluasi Konteks

Adanya evaluasi yang digunakan sebagai gambaran dalam merinci kebutuhan yang belum bisa dipenuhi, populasi dan sampel yang dilayani serta tujuan program

2) Evaluasi Masukan

Evaluasi masukan digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan awal subyek dalam program yang dibuat dan direncanakan

3) Evaluasi Proses

Evaluasi ini menunjuk pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan”

(*when*) kegiatan akan selesai. Pada model ini, diarahkan kepada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

4) Evaluasi Produk atau Hasil

Evaluasi ini mengarah kepada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah, evaluasi produk merupakan tahap terakhir dalam rangkaian evaluasi program

2. Pendidikan Inklusi

a. Pengertian Pendidikan Inklusi

Sapon-Sevin dalam Ahmad Wasita (2012: 78) menjelaskan pendidikan inklusi sebagai sistem layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Oleh karena itu, beliau menekankan adanya restrukturisasi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber dan dukungan dari semua guru dan siswa.

Nini Subini (2014: 50) mengartikan pendidikan inklusi adalah kebersamaan untuk memperoleh pelayanan pendidikan dalam satu kelompok secara utuh bagi seluruh anak berkebutuhan khusus usia sekolah, mulai dari jenjang TK, SD, SLTP, sampai dengan SMA/SMK sederajat.

Nenden Ineu (2010:1) menjelaskan jika pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata *Education for All* yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan.

b. Latar Belakang Pendidikan Inklusi

Setiap anak harus diperlakukan sama seperti kita memperlakukan orang dewasa dan melayani sesuai kebutuhannya. Para pendidik usia dini perlu memperhatikan kebutuhan individual anak didiknya, termasuk kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus (selanjutnya disingkat ABK) atau anak berkelainan karena perkembangan yang terjadi pada masa ini akan membentuk pola tertentu dalam setiap tahapan kehidupan yang tidak saja untuk perilaku aktual semata, namun juga untuk pertumbuhan dan penyesuaian yang akan datang (Reni Akbar,2001:14).

Menurut Tarsidi dalam buku Takdir Ilahi (2013:31) pada akhir 1990-an upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerja sama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB. Satu paragraf dalam pasal 2 memberikan argumen yang sangat *inspiring* untuk sekolah inklusif. Dalam pasal tersebut dikatakan

bahwa “Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua

c. Tujuan Pendidikan Inklusi

Menurut Reni Akbar (2001:14) menjelaskan ada 2 tujuan pendidikan inklusi, yaitu:

- 1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik

d. Landasan Pendidikan Inklusi

Terdapat lima landasan yang digunakan sebagai dasar dalam pendidikan Inklusi menurut Mergy Religiana (2016:14) yaitu:

1) Landasan Filosofis.

Landasan filosofis pendidikan inklusi adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas pondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika. Dengan landasan Bhineka Tunggal Ika maka kita

sebagai bangsa Indonesia harus memiliki sikap saling menghargai atas segala perbedaan yang ada. Filosofi Bhineka Tunggal Ika mencerminkan bahwa di dalam setiap individu memiliki potensi yang luar biasa.

Secara umum, pendidikan berperan penting untuk menggali potensi dan mengembangkannya. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk memberdayakan potensi manusia, baik aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Sementara keunggulan dan kekurangan merupakan cerminan dari kebhinekaan yang merangkul semua perbedaan yang ada, baik agama, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan keterbatasan fisik dan mental. Pendidikan tidak seharusnya mempertimbangkan hal tersebut dan membatasi anak berkebutuhan memasuki pendidikan formal. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam.

2) Landasan Religius.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak bisa lepas dari konteks agama karena pendidikan merupakan tangga utama dalam mengenal Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang satu sama lain berbeda (*individual differences*). Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama lain agar saling berhubungan dan saling melengkapi

dengan segala aspek keberadaannya (QS Al-Hujarat [49]: 13). Anak didik yang membutuhkan layanan pendidikan inklusi pada hakikatnya adalah manifestasi dari manusia sebagai makhluk yang berbeda atau *individual differences*.

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) oleh para menteri pendidikan sedunia. Sementara di Indonesia, penerapan pendidikan inklusi dijamin oleh Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 31 (1), serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4) Landasan Pedagogis.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Dengan jaminan Undang-Undang ini, pelaksanaan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus akan semakin berkembang.

5) Landasan Empiris.

Beberapa peneliti melakukan analisis terhadap penerapan pendidikan inklusi. Hasil analisis yang dilakukan oleh Calberg dan Kavale (1980) terhadap tindakan penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 tindakan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusi berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya (dikutip Mohammad Takdir Ilahi, 2013: 80)

e. Model Pengelolaan Kelas di Sekolah Umum

Menurut Imam Azhar (2013:93) menjelaskan jika terdapat 4 pengelolaan model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar, yaitu:

1) Humanistik

Menurut Carl Rogers Model humanistik dalam pengelolaan kelas menekankan pada faktor keunikan setiap individu pembelajar. Pada model ini, intervensi pembelajar sangat dikurangi, bahkan lebih menitikberatkan pada partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas, sistem supervise, dan pengembangan internal individu pembelajar.

Michael Marland juga mendeskripsikan beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan kelas model humanistik, yang mencakup:

- (a) Mempedulikan pembelajar (*caring for children*), pembelajar harus menunjukkan sikap peduli kepada pembelajar.
- (b) Membuat aturan (*setting rules*).
- (c) Memberikan penghargaan (*giving legitimate praise*).
- (d) Menggunakan humor (*using humor*), dan
- (e) Merancang dan membentuk lingkungan belajar (*shaping the learning environment*)

2) Behavioristik

Teori *Operant Conditioning Skinner* Model behavioristik pada pengelolaan kelas menekankan pada peran vital pembelajar dan arahan atau instruksi dari pembelajar. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa perilaku menyimpang merupakan hasil dari kegagalan untuk mempelajari perilaku yang diinginkan. Model ini menganjurkan adanya atau diberlakukannya konsekuensi- konsekuensi perilaku dalam usaha meminimalisasi masalah di kelas, disamping menggunakan perilaku-perilaku tersebut untuk mengoreksi jika perilaku menyimpang tersebut diulang atau terjadi kembali.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip model behavioristik yang diterapkan dalam praktek pembelajaran menurut *Hartley* dan *Davies* adalah:

- (a)“Proses belajar dapat terjadi dengan baik bila pebelajar ikut terlibat aktif.
- (b)Materi pelajaran disusun dalam urutan yang logis supaya pebelajar mudah mempelajari dan dapat memberi respon tertentu.
- (c)Tiap-tiap respon harus diberi umpan balik secara langsung. Setiap kali pembelajar memberikan respon yang benar perlu diberi penguatan”.

3) Demokratik

Kounin dan Dreikurs. model demokratis juga sangat menghargai perbedaan dan hak-hak individual pembelajar, dan bahkan menekankan pada pentingnya kebebasan bersuara. Pada model ini, para pebelajar diberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan mengelola kelas mereka. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan adalah *relatively studentcentered*. Pada saat yang sama pula, peran pembelajar dalam pengelolaan kelas juga besar. Terkadang para pembelajar diharapkan mampu menunjukkan alasan yang rasional untuk menerima perilaku pembelajar. Terdapat tiga cara bagi para pembelajar yang dapat digunakan untuk

mempertahankan dan memelihara fokus pebelajar dalam proses pembelajaran. Yaitu:

(a) Mengembangkan cara-cara yang dapat membuat para pebelajar memiliki sikap tanggung jawab, seperti: pemberian tugas individual, presentasi, produk dan uji kompetensi.

(b) Menggunakan kelompok, dan

(c) Memformat kelas atau materi pelajaran yang minim dengan kebosanan

4) Konstruktifis

Model ini merupakan terjemahan dari konsep DePorter yaitu 'mengorkestrasi lingkungan yang mendukung'. Sebagai pancaran dari aliran konstruktivis, tentunya model ini lebih berpihak pada pendekatan pembelajaran *student-centered* seperti pada model humanistic dan model demokratik

f. Model Pengelolaan Kelas di Sekolah Inklusi

Pendidikan inklusi memiliki beberapa model menurut Agustyawati dan Solicha (2009:100), yakni:

1) Kelas Reguler (Inklusi Penuh)

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.

2) Kelas Reguler dengan *Cluster*

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus.

3) Kelas Reguler dengan *Pull Out*

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

4) Kelas Reguler dengan *Cluster* dan *Pull Out*

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

5) Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian

Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler.

6) Kelas Khusus Penuh

Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.